



Pendidikan Kewarganegaraan: Landasan Demokrasi yang Inklusif Melalui Pemberdayaan Warga Negara menuju Masyarakat yang Demokratis

Diana Rista¹, Irawan Hadi Wiranata²

Universitas Nusantara PGRI Kediri^{1,2}

dirystarysta@gmail.com¹ wiranata@unpkdr.ac.id²

ABSTRACT

This article explores the role of citizenship education as a foundation for inclusive democratic development through citizen empowerment. In contemporary social and political dynamics, citizenship education has a crucial function in instilling democratic values, encouraging active participation, and increasing critical awareness among society. This article examines various approaches and strategies in citizenship education that are able to empower individuals to become responsible, tolerant citizens and actively contribute to the democratic process. Through a literature review and case study analysis, this article highlights the importance of a comprehensive and inclusive curriculum, as well as the role of teachers and educational institutions in creating a supportive learning environment. In conclusion, effective citizenship education can be a solid basis for building a more inclusive and sustainable democracy, by empowering every citizen to participate positively in the life of society and the state.

Keywords: Pancasila and Citizenship Education, Democracy, Citizenship

ABSTRAK

Artikel ini mengeksplorasi peran pendidikan kewarganegaraan sebagai landasan bagi pembangunan demokrasi yang inklusif melalui pemberdayaan warga negara. Dalam dinamika sosial dan politik kontemporer, pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi krusial dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, mendorong partisipasi aktif, dan meningkatkan kesadaran kritis di kalangan masyarakat. Artikel ini mengkaji berbagai pendekatan dan strategi dalam pendidikan kewarganegaraan yang mampu memberdayakan individu menjadi warga negara yang bertanggung jawab, toleran, dan aktif berkontribusi dalam proses demokratis. Melalui tinjauan literatur dan analisis studi kasus, artikel ini menyoroti pentingnya kurikulum yang komprehensif dan inklusif, serta peran guru dan institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan yang efektif dapat menjadi dasar yang kokoh untuk membangun demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan memberdayakan setiap warga negara untuk berperan serta secara positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kata Kunci: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Demokrasi, Warga Negara

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia menjadi salah satu upaya strategis pendemokrasian bangsa, khususnya di kalangan generasi muda. Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlak mulia



baik dilihat dari aspek jasmani maupun ruhani. (Inanna, 2018) Pendidikan dengan tujuan berorientasi pada pembangunan karakter bangsa dengan menjadikan para generasi muda sebagai subyek pembelajaran, melalui berbagai cara pembelajaran yang demokratis, partisipatif, kritis, kreatif dan menantang aktualisasi diri mereka. Berbicara tentang pendidikan semua pasti sudah tahu bahwa betapa pentingnya pendidikan tersebut. Pendidikan, kemampuan, pengetahuan merupakan salah satu modal yang kita miliki untuk hidup di zaman yang serba sulit ini. Pendidikan merupakan usaha dengan sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif untuk mengembangkan potensi diri peserta didik sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan (Makkawaru, 2019)

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 pasal 1 butir 1 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Menurut UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 3 bahwa Pendidikan nasional bertujuan: “untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan dengan tujuan pembangunan karakter bangsa yang sangat relevan bagi pengembangan pendidikan demokrasi, dikenal dengan istilah Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*). Sebagai komponen warga negara, pengalaman generasi muda dalam praktik berdemokrasi akan sangat berharga bagi proses transformasi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dalam kehidupan sosial. Mengingat bahwa demokrasi bukan sebagai masalah individu maupun kelompok tertentu, maka pembudayaan demokrasi seharusnya menjadi kepedulian semua orang, karena hal ini berhubungan dengan bagaimana cara hidup bersama secara damai di negeri yang majemuk ini. Untuk mewujudkan tujuan tersebut keterlibatan semua pihak dalam proses pendidikan demokrasi adalah faktor pendukung penting keberhasilan program Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh karena itu, peneliti akan membahas bagaimana peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai landasan bagi pembangunan demokrasi yang inklusif melalui pemberdayaan warga negara. Mengingat bahwa demokrasi bukan hanya tanggung jawab individu maupun kelompok tertentu, tetapi pembudayaan



demokrasi harus menjadi kepedulian setiap warga negara.

METODE

Pembuatan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan membaca dan menelaah literatur yang telah dikemukakan oleh peneliti lain yang berhubungan dengan topik dan masalah yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dikemukakan. Beberapa jenis literatur yang digunakan terdiri atas buku-buku atau jurnal mengenai Pendidikan Kewarganegaraan, demokrasi serta sumber lain yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan analisis lanjutan terhadap hasil data yang telah ditemukan sebelumnya dengan menggunakan teori dan metode sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah yang telah ditemukan. Data yang diperoleh tersebut didapatkan dari literatur yang dapat dipertanggung jawabkan yang kemudian disusun dan dituliskan berdasarkan hasil studi kasus sehingga berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan sehingga sesuai dengan tema yang dibahas pada artikel ini.

Penarikan simpulan diperoleh dari hasil merujuk pada rumusan masalah, tujuan penulisan, dan analisis. Simpulan juga memperhatikan penyajian data dari pembahasan yang ditarik pada pokok-pokok pembahasan dalam artikel ini serta didukung dengan saran sebagai bahan acuan dan rekomendasi selanjutnya.

PEMBAHASAN

Konsep dan Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan upaya membentuk dan mewujudkan cita – cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Birawa, 2023) Pendidikan Kewarganegaraan adalah bidang studi yang berfokus pada pembentukan warga negara yang berpengetahuan, bertanggung jawab, dan aktif dalam kehidupan demokratis. Pada intinya, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membekali individu dengan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat dan negara. Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) adalah mata pelajaran yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan. Secara filsafat keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ontologi pokok khususnya pada konsep Demokrasi politik untuk hak dan kewajiban (Syarifah, 2022) Hal ini mencakup pemahaman tentang sistem pemerintahan, proses politik, hukum, dan peran institusi publik. Dengan memahami aspek-aspek ini, individu diharapkan dapat



berpartisipasi secara efektif dalam proses demokrasi dan mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau Civic Education merupakan mata pelajaran wajib pada tingkat dasar hingga perguruan tinggi, yang sudah dijelaskan pada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat (3) yaitu mewajibkan mata kuliah Kewarganegaraan disampaikan di Perguruan Tinggi. Hal ini bertujuan agar generasi muda dapat memahami pentingnya makna kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta berperan aktif dalam menghadapi atau mengatasi suatu masalah dengan baik (Astuti, 2021). Pembentukan pemahaman akan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan. (Wulandari, 2024).

Selain memberikan pengetahuan faktual, pendidikan kewarganegaraan juga menekankan penanaman nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nilai-nilai ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan demokratis, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan dihargai. Pendidikan kewarganegaraan membantu siswa memahami pentingnya menghormati perbedaan dan bekerja sama dalam keragaman, yang merupakan fondasi dari demokrasi yang sehat dan inklusif. Melalui pembelajaran yang mencakup tentang toleransi, kerukunan, dan gotong royong, siswa diajak untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara harmonis. Pendidikan yang menekankan pentingnya menghormati keberagaman juga berkontribusi pada pencegahan konflik sosial dan memperkuat kohesi sosial. (Nawry, 2024).

Pendekatan pedagogis dalam pendidikan kewarganegaraan harus interaktif dan partisipatif untuk mencapai tujuan tersebut. Metode pengajaran yang digunakan termasuk diskusi kelompok, simulasi, proyek komunitas, dan penggunaan teknologi. Diskusi kelompok, misalnya, memungkinkan siswa untuk berbagi pandangan dan belajar dari satu sama lain, sementara simulasi dapat membantu mereka memahami proses politik dan hukum secara praktis. Proyek komunitas memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat langsung dalam masalah sosial, sementara teknologi dapat digunakan untuk mengakses informasi yang relevan dan memperluas wawasan mereka.

Pentingnya pendidikan kewarganegaraan juga terletak pada perannya dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Berpikir kritis sebagai proses disiplin cerdas dari konseptualisasi, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi aktif dan berketerampilan yang dikumpulkan dari, atau dihasilkan oleh observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi



sebagai sebuah penuntun menuju kepercayaan dan aksi (Dermawan, 2023). Siswa diajak untuk menganalisis isu-isu sosial dan politik, mengevaluasi argumen yang berbeda, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Keterampilan ini tidak hanya penting dalam konteks politik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana individu harus mampu membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berkontribusi pada pembentukan individu yang berpikir kritis dan mampu berkontribusi secara konstruktif dalam masyarakat.

Pada akhirnya, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menciptakan warga negara yang tidak hanya sadar akan hak dan kewajibannya, tetapi juga termotivasi untuk berperan aktif dalam kehidupan demokratis. Ini mencakup partisipasi dalam pemilihan umum, keterlibatan dalam organisasi masyarakat, dan advokasi untuk perubahan sosial yang positif. Dengan memberdayakan individu melalui pendidikan kewarganegaraan, diharapkan mereka dapat menjadi agen perubahan yang mendorong demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendidikan kewarganegaraan yang efektif, masyarakat dapat dibangun menjadi lebih adil, toleran, dan demokratis, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi.

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Landasan Demokrasi

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pilar fundamental dalam pembangunan dan pemeliharaan demokrasi. Dalam demokrasi, partisipasi aktif dari setiap warga negara sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat dan bahwa hak-hak asasi setiap individu dihormati. Pendidikan Kewarganegaraan mempersiapkan individu untuk memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara efektif. Dengan membekali warga negara dengan pengetahuan tentang sistem pemerintahan, proses politik, dan hukum, pendidikan kewarganegaraan menjadikan mereka peserta yang lebih aktif dan terinformasi dalam demokrasi.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan toleransi diajarkan dan ditanamkan. (Purba, 2024) Nilai-nilai ini merupakan fondasi dari masyarakat demokratis di mana setiap individu dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pendidikan Kewarganegaraan membantu siswa memahami pentingnya hak-hak asasi manusia dan cara-cara untuk memperjuangkannya. Dengan demikian, pendidikan ini tidak hanya membentuk individu yang memahami nilai-nilai demokrasi, tetapi juga siap untuk membela dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu aspek penting dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah



pengembangan keterampilan berpikir kritis. Demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang mampu menganalisis isu-isu politik dan sosial, mengevaluasi argumen yang berbeda, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Pendidikan Kewarganegaraan mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang isu-isu yang mempengaruhi masyarakat mereka, mengevaluasi informasi secara objektif, dan terlibat dalam dialog yang konstruktif. Keterampilan berpikir kritis ini esensial untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam demokrasi didasarkan pada pemahaman yang mendalam dan pertimbangan yang matang.

Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan memainkan peran penting dalam mempromosikan partisipasi aktif dalam proses demokratis. Dengan mengajarkan siswa tentang cara berpartisipasi dalam pemilihan umum, bergabung dengan organisasi masyarakat, dan terlibat dalam kegiatan advokasi, pendidikan kewarganegaraan memotivasi mereka untuk mengambil peran aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Partisipasi aktif ini penting untuk menjaga dinamika demokrasi, di mana kebijakan dan keputusan publik dihasilkan melalui partisipasi luas dari masyarakat.

Pada akhirnya, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk memberdayakan individu sebagai warga negara yang bertanggung jawab, sadar akan hak dan kewajibannya, dan berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Dengan menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai landasan demokrasi, kita dapat memastikan bahwa setiap generasi tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya partisipasi, nilai-nilai demokrasi, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan publik. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang stabil, damai, dan demokratis, di mana setiap individu memiliki suara dan mampu berkontribusi secara positif.

Demokrasi dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan memiliki makna yang mendalam dan berlapis, mencakup aspek teori dan praktik yang saling terkait untuk membentuk warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab. Pada tingkat dasar, demokrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan mengacu pada pemahaman mengenai sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mengajarkan prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti hak pilih, kebebasan berpendapat, kesetaraan di depan hukum, dan partisipasi warga dalam proses politik. (Ulfiyyati, 2023).

Lebih dari sekadar memahami konsep teoretis, makna demokrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan juga mencakup pengembangan sikap dan nilai-nilai demokratis. Ini melibatkan penanaman nilai-nilai seperti



toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan pendapat dan bekerja sama meskipun ada perbedaan tersebut. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk membentuk budaya demokratis di dalam sekolah yang kemudian diharapkan akan tercermin dalam masyarakat yang lebih luas.

Pendidikan Kewarganegaraan juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga negara dalam kehidupan demokratis. Makna demokrasi dalam hal ini tidak hanya terbatas pada hak untuk memilih, tetapi juga mencakup berbagai bentuk partisipasi lainnya seperti mengikuti diskusi publik, bergabung dengan organisasi masyarakat, dan terlibat dalam aksi sosial. Siswa diajarkan bagaimana cara berpartisipasi secara efektif dan konstruktif dalam berbagai aspek kehidupan publik. Partisipasi aktif ini sangat penting untuk menjaga dinamika dan kesehatan demokrasi, di mana kebijakan dan keputusan dibuat melalui proses yang inklusif dan partisipatif.

Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan juga mengajarkan keterampilan berpikir kritis yang esensial dalam sebuah demokrasi. Dalam masyarakat yang demokratis, warga negara diharapkan mampu menganalisis informasi, mengevaluasi argumen yang berbeda, dan membuat keputusan yang berdasarkan fakta dan logika. Pendidikan Kewarganegaraan membekali siswa dengan keterampilan ini melalui metode pembelajaran yang interaktif seperti debat, diskusi kelompok, dan analisis kasus. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami apa itu demokrasi, tetapi juga bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pada akhirnya, makna demokrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk memberdayakan setiap individu agar mereka dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi, mengembangkan sikap dan nilai-nilai demokratis, mendorong partisipasi aktif, dan melatih keterampilan berpikir kritis, Pendidikan Kewarganegaraan membantu menciptakan warga negara yang siap dan mampu menjaga dan memperkuat demokrasi. Ini adalah tujuan akhir dari Pendidikan Kewarganegaraan: membentuk warga negara yang bertanggung jawab, terlibat, dan berkomitmen untuk memajukan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan demokratis.

Pemberdayaan Warga Negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Pemberdayaan warga negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses penting dalam membentuk individu yang bertanggung jawab, aktif, dan sadar akan peran mereka dalam masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan memberikan landasan bagi pemberdayaan ini dengan

menyediakan pengetahuan yang mendalam tentang hak dan kewajiban warga negara serta memperkenalkan prinsip-prinsip demokrasi. Pendidikan Kewarganegaraan membantu mengkonsolidasikan rasa cinta tanah air dan memperkuat identitas nasional. Dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara, berkontribusi dalam masyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (Nurlaela, 2023). Melalui pemahaman yang kuat tentang sistem pemerintahan, proses politik, dan hak-hak asasi manusia, individu dipersiapkan untuk berperan aktif dalam pembangunan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan juga mengembangkan sikap dan nilai-nilai yang penting dalam pemberdayaan warga negara. Nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, dan partisipasi aktif ditanamkan melalui pembelajaran yang interaktif dan reflektif. Siswa diajarkan untuk menghargai keragaman, memperjuangkan hak asasi manusia, dan berperan sebagai agen perubahan yang positif dalam masyarakat (Permatasari, 2023). Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mempersiapkan individu untuk menjadi warga negara yang kompeten, tetapi juga berperan dalam membentuk budaya demokratis yang inklusif.

Pendidikan Kewarganegaraan juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Dalam sebuah masyarakat demokratis, kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen yang berbeda, dan membuat keputusan yang berdasarkan fakta sangat penting. Melalui diskusi, debat, dan studi kasus, siswa diajak untuk mempertanyakan status quo, mencari solusi atas masalah-masalah sosial, dan berpartisipasi dalam dialog yang konstruktif. (Toron, 2024) Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang kritis dan terinformasi.

Selanjutnya, Pendidikan Kewarganegaraan juga mengajarkan keterampilan keterlibatan aktif dalam masyarakat. Siswa diajak untuk memahami cara-cara berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial, baik melalui pemilihan umum, aksi sosial, atau keanggotaan dalam organisasi masyarakat (Sutisna, 2017). Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan setiap individu dihormati dalam proses pembuatan keputusan. Dengan melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, Pendidikan Kewarganegaraan membantu membangun rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Dengan demikian, pemberdayaan warga negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya tentang memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tentang membentuk sikap, nilai-nilai, dan keterlibatan



aktif dalam masyarakat. Ini adalah upaya jangka panjang untuk menciptakan generasi yang siap dan mampu untuk berperan serta dalam membangun masyarakat yang lebih demokratis, inklusif, dan berkelanjutan. Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya tentang menciptakan warga negara yang terdidik, tetapi juga tentang membentuk pemimpin masa depan yang berkomitmen untuk kebaikan bersama.

Pemberdayaan warga negara dalam negara yang berdemokrasi merupakan landasan yang vital dalam memelihara kesehatan dan keberlanjutan sistem demokrasi itu sendiri. Pendidikan Kewarganegaraan memegang peran kunci dalam memberdayakan warga negara dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan sosial. Melalui kurikulum yang komprehensif, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya memberikan pemahaman tentang struktur pemerintahan dan hak-hak dasar, tetapi juga membangun kesadaran akan tanggung jawab individu dalam menjaga dan memperkuat demokrasi.

Selain memberikan pengetahuan dasar tentang demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan juga mendorong pengembangan sikap kritis dan reflektif terhadap isu-isu politik dan sosial. Dengan merangsang siswa untuk mempertanyakan status quo, memahami berbagai perspektif, dan mengembangkan pemikiran analitis, pendidikan ini membantu menciptakan warga negara yang tidak hanya mengikuti arus, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif dalam masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dalam simulasi pemilihan umum, debat, dan proyek-proyek kolaboratif yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Melalui pengalaman praktis ini, siswa belajar bagaimana cara berkomunikasi secara efektif, bernegosiasi, dan bekerja sama dalam konteks politik dan sosial yang kompleks. Hal ini membantu mereka mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kerjasama yang diperlukan untuk berperan aktif dalam masyarakat.

Selanjutnya, Pendidikan Kewarganegaraan juga menanamkan nilai-nilai demokratis seperti kesetaraan, toleransi, dan penghargaan terhadap pluralitas. (Suacana, 2015) Dengan memperkenalkan siswa pada keragaman budaya, agama, dan latar belakang lainnya, pendidikan ini membangun fondasi untuk menghormati perbedaan dan mempromosikan inklusi sosial. Ini penting dalam memastikan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi hakikat politik, tetapi juga norma sosial yang ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam keseluruhan, Pendidikan Kewarganegaraan berperan sebagai motor pemberdayaan warga negara dalam negara yang berdemokrasi.



Dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan, pendidikan ini membantu memastikan bahwa setiap individu memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan, serta bertanggung jawab atas kesejahteraan bersama. Ini adalah investasi jangka panjang dalam membangun masyarakat yang inklusif, berdaya, dan berkeadilan, di mana demokrasi bukan hanya bentuk pemerintahan, tetapi juga cara hidup yang diperjuangkan oleh setiap warga negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting dalam membentuk individu yang berpengetahuan, bertanggung jawab, dan aktif dalam kehidupan demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mengajarkan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta memperkenalkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk keadilan, kesetaraan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui pendekatan interaktif dan partisipatif, seperti diskusi kelompok, simulasi, dan proyek komunitas, pendidikan ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan berperan sebagai landasan demokrasi, dengan tujuan membentuk warga negara yang mampu berpartisipasi secara efektif dalam proses politik dan sosial. Pendidikan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoretis tentang sistem pemerintahan dan hak-hak dasar, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokratis yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui partisipasi aktif, seperti pemilihan umum dan kegiatan advokasi, warga negara didorong untuk terlibat secara konstruktif dalam masyarakat dan menjadi agen perubahan yang positif.

Pendidikan Kewarganegaraan juga memfasilitasi pengembangan sikap kritis terhadap isu-isu politik dan sosial, serta keterampilan untuk bekerja sama dan memecahkan masalah secara efektif. Dengan demikian, pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan akademis, tetapi juga pada pembentukan sikap dan nilai-nilai demokratis yang esensial untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan demokratis. Pada akhirnya, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk memberdayakan individu agar dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat, menjaga keberlanjutan sistem demokrasi, dan memperkuat norma-norma sosial yang inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Astuti, M. D. (2021). Pengaruh Motivasi Belajar Dalam Pembelajaran Daring Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran) (Vol. 4, pp. 795-800)*.
- Birawa, C. P. (2023). PENGARUH KETERLIBATAN SISWA DALAM



ORGANISASI INTRA SEKOLAH TERHADAP KEDISIPLINAN DAN PRESTASI BELAJAR (SEBUAH STUDI DI SMA NEGERI 1 PATIANROWO). *Doctoral dissertation, Universitas Nusantara PGRI Kediri.*

- Dermawan, D. D. (2023). Analisis Berpikir Kritis Pada Pembelajaran PKN di Sekolah Dasa. *Jurnal Elementaria Edukasia* 6.4 , 1671-1579.
- Inanna. (2018). Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Volume 1 Nomor 1* , 27-33.
- Makkawaru, M. (2019). Pentingnya pendidikan bagi kehidupan dan pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. *Jurnal Konsepsi* 8.3 , 116-119.
- Nawry, N. a. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Identitas Nasional." Sinar Dunia:.. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan* 3.2, 246-254.
- Nurlaela, E. e. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan bagi Mahasiswa Milenial. *Amafrad Press* .
- NURSALIM. (2013). *PKn SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI-MORAL DAN TANTANGANNYA*. Prosiding Seminar Nasional (Vol. 1, No. I).
- Permatasari, A. I. (2023). MPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA KELAS V MENGGUNAKAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 4 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2022/2023. *Diss. UIN Surakarta*.
- PRISTIANI, Y. D. (2020). HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN SIKAP SOSIAL SISWA KELAS X SMK PGRI 4 KEDIRI. *Doctoral dissertation, Universitas Nusantara PGRI Kediri*.
- Purba, A. A. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MTs Swasta 27 Firdaus. *Journal on Education* 6.3, 17274-17280.
- Sasmita, W. W. (2023). Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital untuk Menumbuhkan Budaya Akademik Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri. *In Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran) (Vol. 6, pp. 19-32)*.
- Suacana, I. (2015). Nilai-nilai dan Parameter Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 5.1, 81-106.
- Sutisna, A. (2017). eningkatan literasi politik pemilih pemula melalui pendekatan pembelajaran kontekstual. *Prosiding Seminar Nasional*

Pendidikan FKIP, Vol. 1. No. 2.

Syarifah, F. N. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wawasan Demokrasi Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* e-ISSN: 2963-3176 Vol. 01 No. 02.

Toron, V. B. (2024). SOSIOLOGI PENDIDIKAN. CV. Ruang Tentor.

Ulfyyati, A. R. (2023). Demokrasi: tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan. *Advances In Social Humanities Research* 1.4, 435-444.

Wiranata, I. H. (2022). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Membangun Masyarakat yang Demokratis. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(1), 41-46.

Wulandari, Y. a. (2024). Analisa Problematika Pendidikan Kewarganegaraan Ditinjau Berdasarkan Lunturnya Semangat Nasionalisme Masyarakat Dusun Banjarmelati Desa Tunjung Kecamatan Udanawu. *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan, Sains dan Pembelajaran*. Vol. 3. No. 1.